

ANALYSIS PROBLEMATICS OF ILLEGAL PARKIRNG IN TANAH ABANG MARKET CENTRAL JAKARTA

ABSTRACT

Analysis problematics of illegal practice in Tanah Abang Market Central Jakarta has a purpose to find out why the practice of illegal parking in Tanah Abang Market could persist until today, when it was often obtain enforcement of formal institutions that deal with these illegal parking. Another aim is to determine wheter there is a local strongman in the illegal parkirng so that activities can continue and secure until today.

Methods of execution in this research use qualitative descriptive research with primary data types are the words and actions. Sources of data obtained derived from primary and secondary data. To search for informants in this study is conducted with a purposive sample (making intentional) and accidental sampling (sampling by accident when he met at the study site). Techniques for collecting data using interview, observation and documents.

The practice of illegal parking in Tanah Abang Market is one of the problems that have been around a long time in this area. Illegal parking is the case in areas that already have a ban on parking. Illegal parking makes the area more often jammed, irregular, and rundown. Various policies have been issued by Department of Transportation and Transport Jakarta in dealing with this case, but still no result has yet effective way to reduce this illegal parking. Dept of Transportation and Transport Central Jakarta City Administration has also done various ways and methods to combat this illegall parking. The result are still the same and there has been no change that we can see. Illegal parking practices are able to continue to survive and carry out daily activities. This activitiy is certainly a negative impact on the face of Jakarta as the capital city of Indonesia.

Keywords :Analysis, Illegal Parking Practice, and Tanah Abang Market

1. Pendahuluan

Daerah Khusus Ibukota (DKI Jakarta) adalah provinsi sekaligus ibukota darinegara Republik Indonesia. DKI Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang mempunyai stratifikasi status setingkat provinsi. Provinsi DKI Jakarta terletak di bagian barat Pulau Jawa. DKI Jakarta dahulu lebih dikenal dengan sebutan Sunda Kelapa sebelum tahun 1527, lalu kemudian berganti menjadi Jayakarta pada periode tahun 1527-1619, kemudian berganti lagi menjadi Batavia pada interval periode tahun 1619-1942, lalu kembali berganti dalam waktu singkat menjadi Jakarta Toko Betsu Shi pada tahun 1942-1945, hingga kemudian menjadi nama Jakarta yang kita kenal hingga saat ini.

Tabel 1.1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat di Provinsi DKI Jakarta Periode 2010– 2014

Jenis Kendaraan	2010	2011	2012	2013	2014	Pertumbuhan per Tahun (%)
Motor	8.764.130	9.861.451	10.825.973	11.949.280	13.084.372	10,54
Mobil Penumpang	2.334.883	2.541.351	2.742.414	3.010.403	3.266.009	8,75
Mobil Beban	565.727	581.290	561.918	619.027	673.661	4,46
Mobil Bis	332.779	363.710	358.895	360.223	362.066	2,13
Ransus	-	-	129.113	133.936	137.859	-
Jumlah	11.997.519	13.347.802	14.618.313	16.072.869	17.523.967	9,93

Sumber : Statistik Transportasi DKI Jakarta 2015

Daya tarik DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian akan menimbulkan dampak pada meningkatnya jumlah kendaraan yang ada namun tidak diimbangi dengan jumlah parkir yang memadai. Faktor tersebut adalah salah satu permasalahan di DKI Jakarta yang hingga saat ini belum ada pemecahan yang jelas. Permasalahan tersebut adalah permasalahan mengenai perparkiran terkait parkir liar yang saat ini masih saja menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam melaksanakan program

tersebut. Salah satu tempat parkir liar yang saat ini ada adalah kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat.

Pasar Tanah Abang merupakan sentra perbelanjaan terbesar se-Asia Tenggara dimana semua aktifitas perdagangan di DKI Jakarta terpusat di pasar Tanah Abang tersebut. Kepemilikan akan ruang publik di kawasan ini sangatlah terbatas sehingga pemakaian lahan parkir terkadang menggunakan jalur trotoar yang notabene digunakan untuk kaum pejalan kaki justru digunakan sebagai daerah parkir bagi kendaraan khususnya roda dua, sehingga mengganggu para pejalan kaki di sekitar area tersebut karena otomatis mereka akan jalan tidak pada jalur pejalan kaki melainkan pada pinggir jalan yang notabene digunakan sebagai jalur kendaraan berjalan. Parkir liar di pasar Tanah Abang sendiri biasanya didominasi oleh kendaraan roda dua. Banyak aspek mengapa pasar Tanah Abang memiliki tingkat parkir liar yang sulit diberantas oleh lembaga formal di DKI Jakarta.

Faktor yang pertama adalah kurang disediakannya fasilitas parkir yang luas untuk kendaraan roda dua di pasar Tanah Abang sehingga banyak kendaraan roda dua yang di parkir di pinggir jalan sepanjang pasar Tanah Abang sehingga menyebabkan terjadinya parkir liar tersebut. Faktor kedua mengapa parkir liar di pasar Tanah Abang sulit untuk diberantas adalah karena dari sisi masyarakatnya sendiri yang bisa dengan mudah mendapatkan motor di dealer-dealer motor yang ada. Kemudian ditunjang dengan proses kredit yang sangat mudah dan murah sehingga masyarakat akan dengan gampang untuk membeli kendaraan bermotor roda dua. Meskipun sebenarnya pemerintah sudah menyediakan transportasi publik di DKI Jakarta, tapi masyarakat tetap memilih untuk menggunakan kendaraan roda dua karena dianggap lebih praktis dan gampang untuk diajak bermobilisasi di DKI Jakarta.

2. Teori dan Metoda

2.1 Teori

Permasalahan sistem perparkiran di Pasar Tanah Abang Jakarta khususnya masalah parkir liar bukanlah hal yang baru lagi dalam kehidupan di DKI Jakarta. Parkir liar di Tanah Abang biasanya dilakukan di tempat-tempat umum yang pada nyatanya bisa menyebabkan ketidaknyamanan kepada pengguna jalan yang lainnya. Bahkan terkadang praktik parkir liar tersebut dilakukan di area yang mempunyai rambu-rambu dilarang parkir yang notabene larangan tersebut haruslah dipatuhi dan ditaati. Tetapi tetap saja dilakukan dan dijalankan oleh para petugas parkir ilegal.

Indikasi adanya permainan yang kuat dari institusi informal jelas akan menimbulkan penguatan pada sistem non-formal yang artinya kekuatan sistem formal dalam mengikat masyarakat akan semakin berkurang karena semakin kuatnya sistem non-formal tersebut. Institusi non-formal seakan menjadi salah satu faktor ancaman karena institusi non-formal membuat peraturan yang bisa diterima sedikit lebih baik dibandingkan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh institusi formal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga meskipun sudah diterbitkan Peraturan Daerah tersebut, tetap saja kekuatan dari lembaga non-formal lebih besar dibandingkan dengan lembaga formal yang ada.

Adanya fenomena dimana kekuatan lembaga informal jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatan dari lembaga formal dan di khawatirkan akan mampu menggantikan kedudukan dari lembaga formal dikenal dengan sebutan Negara Bayangan atau "*Shadow State*". *Shadow State* jika dikaitkan dengan fenomena di DKI Jakarta mengenai sistem perparkiran yang semrawut, sangatlah padu. Bisa dikatakan seperti itu karena kejadian berupa parkir liar tersebut selalu kembali terjadi berulang-ulang dengan kondisi yang sama,

seakan-akan menjadi kegiatan rutin yang pasti akan dilakukan dan oknum-oknum yang mengerjakannya juga oknum-oknum yang sama dari sebelumnya

Teori *Shadow State* ini dicetuskan oleh William Reno (1995)¹. Wiliam Reno menyatakan bahwa kondisi Negara Bayangan akan hadir, tumbuh dan berkembang tatkala terjadi pelapukan fungsi pada institusi pemerintah formal. Penyebab utama dari terjadinya pelapukan fungsi tersebut antara lain, karena para elit penyelenggara pemerintah formal mengalami ketidakberdayaan dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik dominan yang berada di luar struktur pemerintah. Konsekuensi logis dari kondisi seperti ini adalah maka pada tingkat realitas, penyelenggaraan pemerintahan akan lebih banyak dikendalikan oleh otoritas informal dengan struktur pemerintahan itu sendiri. Jadi, kewenangan lembaga informal akan lebih besar dibandingkan dengan kewenangan dari lembaga formal.

“[Negara bayangan] adalah bagian itu dari perekonomian informal dan ‘rill’ yang tidak dapat berjalan tanpa sebuah negara dengan bentuk tertentu. Walaupun secara analitis ia dapat dipisahkan dari pengertian negara sebagai sebuah kumpulan lembaga penguasaan politik & eksklusif yang berpusat pada pemerintah, ‘Negara bayangan yaitu justru merupakan bagian dari negara yang benar - benar ada [...] Dengan demikian negara yang sesungguhnya, termasukbayangannya, lebih besar dari negara formal, dan berkepentingan dalam mengekalkan sebuah negara formal yang sakit dan keropos².

Ada sebuah konsep dari *local strongmen* yang dicetuskan oleh Joel Migdal (1988)³. Joel Migdal melihat ada tiga proporsi yang diajukan dalam meninjau *local strongmen* ini. Pertama, *Local Strongmen* hanya dapat berdiri

1Syarief Hidayat. (2006). *Bisnis & Politik Di Tingkat Lokal*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. hlm.8.

2Henk Schulte Nordhot dan Gerry van Klinken dibantu oleh Ireen Karang – Hoogenboom. Pengantar : Anies Baswedan. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. KITLV. hlm.35.

jika tidak terdapat kontrol sosial yang kuat, fragmentasi atas kontrol memungkinkan aktor ini dapat bergerak bebas dalam memperluas wilayah kekuasaan, termasuk 'bekerjasama' dengan elit negara ataupun birokrat lokal. Kedua, *Local Strongmen* umumnya memiliki strategi bertahan dengan menguasai hajat hidup penduduk lokal, yang berdasarkan kondisi ini ia memperoleh basis legitimasi yang kuat di kalangan *grassroot*. Ketiga, pembangunan nasional seringkali terhambat dengan eksistensi *local strongmen*, kasus yang bagi Migdal banyak terjadi di negara dunia ketiga.

2.2 Metoda

Pada penelitian tentang analisis problematika praktik parkir liar di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya⁴. Lokasi penelitian adalah di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Pasar Tanah Abang dipilih menjadi lokasi penelitian karena lokasi ini merupakan salah satu daerah dengan tingkat parkir liar yang cukup tinggi di DKI Jakarta. Lokasi ini sering mendapatkan penindakan dari Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat namun tetap saja kegiatan tersebut kembali terjadi dan terus berulang.

Subjek penelitian yang ada diantaranya adalah pihak dari Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat yang juga terdiri dari Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Sudinhubtrans Kota Administrasi Jakarta Pusat, petugas parkir liar dan beberapa masyarakat pengguna parkir liar di kawasan tersebut.

³http://www.academia.edu/2612170/Local_Bossism_Indonesia_dan_Thailand_dalam_Perspektif_Komparatif. Diunduh pada tanggal 22 Agustus 2015, pukul 19.45 WIB

⁴Nyoman Dantes.(2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi. hlm.51.

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah untuk kemudian dijadikan susunan yang padu dalam penelitian kualitatif. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data. Mana data yang memang diperlukan dalam menunjang kasus ini, dan mana yang tidak menunjang data ini. Kemudian setelah dilakukan proses pemilahan, akan dilakukan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data. Setelah itu melakukan pendalaman data dan langkah terakhir adalah melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian nantinya.

3. Hasil Penelitian

3.1 Bagaimana praktik parkir liar bertahan di Pasar Tanah Abang Jakarta

Pusat

Kondisi lahan parkir dalam hal ini satuan ruang parkir yang ada di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat sangatlah kurang memadai dari jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang berkunjung ke tempat tersebut. Blok A dan Blok B yang notabene merupakan gedung terbesar dari Pasar Tanah Abang ternyata tidak mampu menampung dengan baik jumlah kendaraan yang ingin parkir di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Hal tersebut menyebabkan munculnya kantong-kantong parkir liar di kawasan tersebut.

Parkir liar di Pasar Tanah Abang sendiri semakin diperparah dengan adanya sikap atau kebiasaan masyarakat akan cara praktis dalam memarkirkan kendaraannya di tempat umum termasuk di Pasar Tanah Abang ini. Masyarakat mengetahui aturan dan larangan yang ada namun tetap saja mereka memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang tidak semestinya.

Perputaran uang di Pasar Tanah Abang juga sangatlah besar di bidang parkir liar. Jumlah yang sangat besar tersebut banyak mengundang orang untuk bekerja menjadi petugas parkir liar di Pasar Tanah Abang

**Tabel 3.1 Estimasi Jumlah Perputaran Uang Parkir Liar di
Pasar Tanah Abang**

Tarif Parkir Liar x Jumlah kendaraan yang parkir	Satu Hari	Satu Bulan	Satu Tahun
Rp. 2000 x 1000	Rp. 2.000.000	Rp.60.000.000	Rp. 720.000.000
Rp. 3000 x 1000	Rp. 3.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 1.080.000.000
Rp. 4000 x 1000	Rp. 4.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 1.440.000.000
Rp. 5000 x 1000	Rp. 5.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 1.800.000.000

Sumber : Diolah dari hasil penelitian di Pasar Tanah Abang Tahun 2016

Dari tabel diatas jelas perputaran uang yang sangat besar ini membuat banyak orang yang ingin menjadi petugas parkir liar dengan beberapa tujuan salah satunya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Parkir Liar di Pasar Tanah Abang secara tidak langsung disebabkan juga oleh terus meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Hal tersebut membuat jumlah kendaraan semakin padat dan tidak terkendali sedangkan jumlah parkir yang ada laju pertumbuhannya sangatlah kecil.

3.2 Kelompok Lokal di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat

Pasar Tanah Abang mempunyai kelompok lokal yang berada di kawasan tersebut. Organisasi kemasyarakatan tersebut bernama Pemuda Panca Marga (PPM). Organisasi ini memiliki kantor sekretariat di Pasar Tanah Abang tepatnya disebelah stasiun Tanah Abang. Ormas ini diduga memiliki indikasi sebagai kelompok pelindung karena merupakan satu-satunya ormas yang memiliki kantor di pasar tersebut. Namun, ternyata ormas tersebut hanya sebagai organisasi keamanan di kawasan tersebut yang tugasnya hampir mirip dengan siskamling di daerah pedesaan. Mereka juga tidak pernah mengetahui mengenai parkir liar di Pasar Tanah Abang tersebut dan bukan sebagai kelompok pelindung di kawasan tersebut.

3.3 Orang Kuat Lokal di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat

Haji Lulung dikenal sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dan diorbitkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga bisa jadi

seperti ini. Haji Lulung juga menjadi simbol dan orang yang sangat di hormati di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Oleh sebab itu, Haji Lulung menjadi orang kuat dan *back up* yang sangat kuat untuk terus melanjutkan perparkiran yang ada di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat sehingga proses penertiban parkir liar yang ada saat ini masih sangat sulit untuk dilakukan.

Sejarah awal Haji Lulung hingga menjadi orang yang berkuasa dan berpengaruh di Pasar Tanah Abang adalah diawali ketika dahulu menjadi seorang pemulung untuk mempertahankan hidupnya. Berlanjut menjadi anak buah dari Hercules sang penguasa Tanah Abang saat itu. Nasibnya mulai berubah ketika beliau menjadi salah satu pengikut Bang Ucu yang saat itu merupakan jawara betawi.

Pada tahun 2000, Haji Lulung akhirnya mengambil alih kekuasaan Bang Ucu dan menguasai usaha perparkiran dan pengamanan di Tanah Abang. Dengan cerdik, Haji Lulung menempuh jalur resmi dengan mendirikan PT Putrajaya Perkasa kemudian berkembang berturut-turut mendirikan PT Tujuh Fajar Gemilang dan PT Satu Komando Nusantara. Semua perusahaan dibawah pimpinan Lulung ini bergerak di bidang perparkiran, jasa keamanan, dan penagihan hutang. Selain itu, beberapa tahun kemudian dia mendirikan kantor pengacara yang diberi nama Haji Lulung & Associates. Namun begitu, dia tetap rutin mengirim setoran atau upeti kepada Bang Ucu tiap bulannya. Bahkan selanjutnya, Lulung juga mendirikan kantor advocat yang bernama Lunggana advocat & friends yang berlokasi di Tanah Abang⁵. Selanjutnya beliau terjun ke dunia politik menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

4. Pembahasan

⁵<http://masshar2000.com/2015/03/08/mengenal-haji-lulung-si-penguasa-tanah-abang/>. Diunduh pada tanggal 25 Januari 2016, pukul 21.47 WIB

Garis besar dari hasil penelitian ini jika kita hubungkan ke dalam teori *shadow state* dan *local strongman* maka akan ada beberapa kesamaan dengan kondisi yang ada di lapangan. Pada permasalahan praktik parkir liar di Pasar Tanah Abang, terdapat *local strongman* yang ada di dalamnya yaitu H. Abraham Lunggana. Dalam pemahaman teori mengenai *local strongman*, individu tersebut akan berusaha melindungi kepentingan dan hajat hidup orang banyak di dalamnya. Selain itu, *local strongman* ada akibat adanya legitimasi yang kuat serta terdapat sumber daya yang ia miliki dalam daerah tersebut. Legitimasi yang ada akan digunakan untuk mempertahankan kepentingan dan sumber daya yang ada di dalamnya. *Local strongman* kemudian masuk ke dalam sistem pemerintahan yang bisa menyebabkan gejala *shadow state*.

Kepentingan-kepentingan yang ada di dalam Pasar Tanah Abang menjadikan alat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seakan kurang efektif sampai saat ini. Setidaknya, Haji Lulung menjadikan posisi dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta untuk mempertahankan kepentingannya di Pasar Tanah Abang agar kebijakan yang dikeluarkan bisa kembali efektif. Terlebih lagi, Haji Lulung mempunyai bisnis di bidang perparkiran dan advokat yang bisa menjadi jalan dia untuk terus mempertahankan kegiatan-kegiatan yang ada di Pasar Tanah Abang dalam hal ini adalah parkir liar.

Jadi, bisa ditarik benang merah bahwa terdapat konsep *shadow state* didalam sistem pemerintahan DKI Jakarta terkait dengan parkir liar di Pasar Tanah Abang ini. Haji Lulung mempunyai usaha yang ada di Pasar Tanah Abang, kemudian menjadi salah satu wakil penguasa di DKI Jakarta melalui jabatan pemerintahan sehingga muncullah benang merah akan adanya *shadow state* dalam tatanan pemerintah. Kelompok resisten dalam hal ini Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat akan selalu kesulitan apabila kebijakan-kebijakan yang ada

hanya akan kembali tidak berfungsi kembali karena kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh sosok orang yang berpengaruh di dalam permasalahan tersebut yang tidak lain juga wakil ketua DPRD DKI Jakarta karena peraturan dan kebijakan yang ada dan akan disahkan akan melalui proses di legislatif yang diisi oleh Haji Lulung tersebut.

Dalam kaitannya dengan *conflict of interest*, Haji Lulung akan berusaha untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang ada dan akan dibuat di lembaga legislatif DKI Jakarta. Kebijakan-kebijakan yang dipengaruhi tersebut akan berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang dia miliki terutama dalam hal perpajakan di Tanah Abang dan kepentingan-kepentingan lainnya yang ada di Tanah Abang tersebut. Kebijakan tersebut dipengaruhi agar nantinya kebijakan yang disahkan dan dijalankan tidak terlalu membawa dampak yang signifikan dalam praktiknya. Kebijakan yang dipengaruhi oleh *local strongman* tersebut agar nantinya kebijakan tersebut tetap mendatangkan keuntungan bagi *local strongman* tersebut dan bukan membawa kerugian.

Oleh sebab itu, adanya *conflict of interest* di dalam tubuh lembaga legislasi yang juga berlabel sebagai *local strongman* di Tanah Abang merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak etis dan tidak patut untuk dicontoh dan ditiru karena akan menyebabkan kerugian di salah satu pihak dan tetap menguntungkan di pihak yang lain meskipun ada kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak akan berpengaruh banyak pada kondisi di lapangan karena kebijakan yang dibuat tersebut telah dipengaruhi oleh *local strongman* yang ada di dalamnya yang notabene juga merupakan orang berpengaruh di Tanah Abang. Sehingga kebijakan tersebut akan terasa kurang berpengaruh dan eksistensi *local strongman* tersebut akan tetap bisa bertahan karena dia berhasil untuk mempertahankan kepentingan-

kepentingan yang ada dan dibawa di Pasar Tanah Abang tersebut mengenai perparkiran.

5. Kesimpulan

Problematika praktik parkir liar di Pasar Tanah Abang merupakan salah satu masalah yang sudah ada sejak lama. Parkir liar di Pasar Tanah Abang terus saja bertahan dan terjadi setiap harinya sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan kemacetan yang sangat parah. Banyak usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam memberantas praktik parkir liar tersebut, namun tetap saja kegiatan tersebut kembali berlangsung dan tetap ada sampai saat ini.

Faktor yang menyebabkan parkir liar di Pasar Tanah Abang terus bertahan adalah ketersediaan Satuan Ruang Parkir (SRP) resmi yang masih kurang, serta penambahan jumlah kendaraan di DKI Jakarta yang terus bertambah setiap tahunnya sehingga menyebabkan sarana parkir resmi yang ada tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang setiap tahun terus bertambah dan menyesaki DKI Jakarta.

Faktor lain dilihat dari faktor ekonomi. Perputaran dan pemasukan uang di Pasar Tanah Abang terutama di bidang parkir liar dalam satu bulan yang bisa mencapai Rp. 150 juta rupiah dan dalam satu tahun yang bisa lebih dari Rp. 1 milyar rupiah menyebabkan banyak orang tergiur dan ingin bekerja di dalam lingkaran tersebut. Masalah parkir liar yang terus bertahan ini juga diperkuat oleh adanya orang kuat lokal di kawasan Tanah Abang tersebut yang dianggap sebagai sosok yang sangat dituakan dan dihormati yaitu H. Abraham Lunggana (H. Lulung). Sosok ini dihormati dan disegani di seluruh elemen kawasan Tanah Abang termasuk Pasar Tanah Abang sendiri sehingga semakin membuat parkir liar tersebut tetap eksis dan bertahan sampai saat ini. Orang kuat lokal tersebut berhasil melegitimasi dirinya di dalam elemen Tanah Abang dan menancapkan pengaruh yang besar di Pasar Tanah Abang serta menjadi salah satu wakil ketua DPRD DKI Jakarta.

Kondisi ini menyebabkan sedikit banyak mempengaruhi kebijakan yang dibuat dan diputuskan terutama di masalah perparkiran di DKI Jakarta dan Pasar Tanah Abang tersebut sehingga menyebabkan adanya *shadow state* di dalam tubuh pemerintahan DKI Jakarta .

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Pusat yang mengurus masalah parkir liar tersebut. Namun, rasanya belum bisa efektif dan sempurna untuk saat ini jika hanya melakukan usaha melalui penindakan di lapangan saja.

Perlu adanya tindakan tegas kepada orang yang terlibat dan melindungi kegiatan yang bersifat ilegal dan menguntungkan beberapa pihak. Praktik hukum dan langkah pembuatan hukum mengenai perparkiran juga harus kuat dari serangan intervensi pihak-pihak yang menginginkan keuntungan pribadi. Selain itu, perlunya untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat juga dirasa penting mengingat salah satu faktor mengapa praktik parkir liar bisa terus bertahan karena kebiasaan dan kepatuhan masyarakat akan hukum dan aturan yang masih rendah. Lalu, tindakan-tindakan di lapangan juga harus tetap dilaksanakan lebih intensif agar parkir liar tersebut bisa semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Astanti, Dhian Indah. *Dasar-Dasar Manajemen Industri Asuransi. Fakultas Hukum Universitas Semarang.*
- Basrowi., Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* 2008. Jakarta .
- Chris Bagiyarsa, Yosef., Huning Anwariningsih, Sri., dan Retnoningsih, Dwi. *Sistem Informasi Area Parkir Di Universitas Sahid Surakarta. Program Studi Teknik Informatika Universitas Sahid Surakarta.*
- Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian.* 2012. Edisi Pertama. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Djayadi Putra, Ruchjat., Jinka, Yamin., dan Wikantari, Ria., *Analisis Sistem Perparkiran dan Pengembangan Jaringan Transportasi Pada Kawasan Pantai Losari Kota Makassar.*
- Goss, Sue. *Making Local Governance Work Networks, Relationships and the Management of Change.* 2001. Palgrave. New York.
- Hidayat, Syarif. *Bisnis & Politik Di Tingkat Lokal.* 2006. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. hal8
- Lesmana, M. Eril. *Analisis Kebutuhan Parkir Mobil dan Motor Pasar Tanah Abang Blok B.* Perpustakaan Universitas Mercu Buana. 2015
- Munawar, Ahmad. *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan.* 2006 Cetakan Kedua. Penerbit “Beta Offset”. Jogjakarta.
- Nordhot, Schutle Henk dan Gerry van Klinken dibantu oleh Ireen Karang – Hoogenboom. *Politik Lokal di Indonesia.* 2007. Pengantar : Anies Baswedan. Yayasan Obor Indonesia. KITLV – Jakarta.
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif.* 2009. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Saeful Rahmat, Pupu. *Penelitian Kualitatif.* 2009. Equilibrium.
- Safitri, Benita. *Pengelolaan Parking On Street Oleh Unit Perparkiran DKI Jakarta (Studi Kawasan Parking On Street Melawai, Jakarta Selatan).* Universitas Indonesia. 2012

Setiawan., Rudy. *Penerapan Manajemen Transportasi Kampus Sebagai Upaya Mengurangi Penggunaan Mobil (Studi Kasus Universitas Kristen Petra)*. Universitas Kristen Petra. Surabaya. 2004.

Internet :

BadanPusatStatistik. 2015. *StatistikTransportasi DKI Jakarta 2015*. Jakarta

<http://masshar2000.com/2015/03/08/mengenal-haji-lulung-si-penguasa-tanah-abang/>. Diunduhpadatanggal 25 Januari 2016, pukul 21.47 WIB

http://www.academia.edu/2612170/Local_Bossism_Indonesia_dan_Thailand_dalam_Perspektif_Komparatif. Diunduhpadatanggal 22 Agustus 2015, pukul 19.45 WIB

https://prezi.com/xxj9wfc_uct3/permasalahan-parkir-liar-di-kebayoran/. Diunduhpadatanggal 23 Oktober 2015, pukul 21:10 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33769/3/Chapter%20II.pdf>. Diunduhpadatanggal 23 Agustus 2015, pukul 16.00 WIB

<http://makassar.tribunnews.com/2012/10/04/orang-kuat-lokal-bos-lokal-dan-pilgub-2013>. Diunduhpadatanggal 5 Oktober 2015, pukul 22.30 WIB